

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Kasus pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI)**

MUHAMMAD JALIL, SE., M.Ak
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
Email : m.jalil10000@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the extent of the influence of corporate governance on tax avoidance. This research was conducted on banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2018 observation year. The sample method used was purposive sampling method with a total sample of 75 observations. The data used is secondary data in the form of audited financial statements that are registered and published by the Indonesia Stock Exchange through the site www.idx.co.id. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis with SPSS Statistics 17 tools. Descriptive statistical tests are used to describe the data in the study, the classic assumption test is used to test the existence of bias estimates. The results of this study indicate that partially independent commissioners have no effect on tax avoidance and the audit committee has an effect on tax avoidance. Simultaneous results of independent commissioners and audit committees affect tax avoidance. The independent commissioner and audit committee variables influence tax avoidance of 0.075 or 7.5% on tax avoidance, while the remaining 92.5% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: Independent Commissioner, Audit Committee And Tax Avoidance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun pengamatan 2016-2018. Metode sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 75 pengamatan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan audit yang terdaftar dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS Statistik 17. Uji statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dalam penelitian, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji adanya estimasi bias. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil secara simultan yaitu komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel komisaris independen dan komite audit mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 0.075 atau 7.5% terhadap *tax avoidance*, sedangkan sisanya yaitu 92.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Komisaris Independen, Komite Audit, dan Tax avoidance

1. PENDAHULUAN

Sektor perpajakan merupakan penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber utama penerimaan negara. Seperti yang telah disebutkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Faisal, 2012). Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui strategi-strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan atau yang sering disebut dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Berita online (<https://www.suara.com/bisnis>) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2017 dalam Putri & Putri (2017) menunjukkan bahwa Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto mengatakan 80% perusahaan atau badan usaha melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 110 triliun setiap tahun. Berita lainnya yaitu (www.tribunnews.com/internasional) yang diterbitkan pada tanggal 20 November 2017 dalam Putri & Putri (2017) menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia tidak membayarkan pajak ke Dinas Pajak Indonesia dengan nilai diperkirakan 6.48 miliar dolar AS

Salah satu kasus penghindaran pajak yaitu kasus PT. Pelita dan Molucca dan PT. Permata. Menurut Hotman bahwa terdapat dua keuntungan yang akan didapat Permata soal penghindaran pajak, jika dugaan Molucca memang didirikan Permata. Pertama, Permata akan tehindar dari pajak PPh sebesar 25% sesuai Pasal 17 ayat (2) a UU Pajak Penghasilan, lantaran piutang terhadap Pelita telah dialihkan ke Molucca, dan dihitung sebagai kerugian (*write off*). Kedua, jikalau akhirnya Pelita membayar kewajibannya, lantaran piutang sekanga sudah dipegang oleh Molucca. Kata Hotman, sebagai perusahaan asing, Molucca juga tak berkewajiban membayar pajak ke Indonesia atas pembayaran tersebut (<https://nasional.kontan.co.id/>)

Dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan berusaha untuk menyelesaikan satu dari tiga hal: pembayaran pajak kurang dari yang mungkin diminta oleh interpretasi yang wajar dari hukum suatu negara, pembayaran pajak atas laba yang dinyatakan di negara selain dari tempat mereka benar-benar diterima, atau pembayaran pajak yang terjadi lebih lambat dari keuntungan yang diperoleh. Orang yang melakukan penghindaran pajak seringkali mengandalkan keraguan seputar undang-undang pajak yang berlaku, serta profesional pajak yang ingin mengeksploitasi ketidakpastian ini (Fisher, 2014).

Dalam meningkatkan, memperbaiki kinerjanya serta meminimalisasi resiko bisnis yang mungkin terjadi banyak perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Khoirunisa, 2013). Menurut Wijayanti, Masitoh, and Mulyani (2018) *corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak. Salah satu mekanisme dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dan komite audit sebagai bagian dari *corporate governance* untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan.

Menurut Marselawati, Titisari, and Masitoh (2018) semakin rendah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan akan semakin tinggi penghindaran pajak. Hal ini karena dewan komisaris independen tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kewajiban perpajakan perusahaan dan dalam menjalankan fungsi pengawasan dewan komisaris independen tidak maksimal dalam melakukan pengawasan, sehingga perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak. Sedangkan Widuri, Wijaya, Effendi, & Cikita (2019) dan Maraya & Yendrawati (2016) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terkait dengan pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*, Widuri, Wijaya, Effendi, & Cikita (2019) dan Apriliyana & Suryarini (2018) apabila jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan kecil, perusahaan akan meningkatkan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki sejumlah besar anggota komite, pengawasan yang dilakukan pada manajemen semakin ketat dan mengurangi penghindaran pajak. Akantetapi menurut Waluyo (2019) semakin banyak anggota komite audit, semakin banyak penghindaran pajak perusahaan telah terjadi. Sedangkan Reza (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan ketidakkonsistenan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat menjawab pertanyaan berikut: Apakah tata kelola perusahaan diwakili oleh komisaris independen dan komite audit yang memengaruhi praktik penghindaran pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory (Teori Keagenan)

Menurut Jensen dan Meckling 1976 dalam Maryam (2012) teori keagenan, menjelaskan hubungan antara *agent* (manajemen perusahaan) dan *principal* (pemilik usaha lainnya). Di dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Dalam pelaksanaan teori agensi mengharuskan agen memberikan informasi yang rinci dan relevan atas pendanaan biaya modal perusahaan, total aset, laba atau keuntungan perusahaan, total hutang, penggunaan jasa auditor, struktur kepemilikan pihak luar, serta penggunaan teknologi informasi sebagai sarana untuk penyajian laporan keuangan kepada publik. Jadi, seluruh informasi yang menyangkut tentang posisi keuangan suatu perusahaan dirangkum dalam laporan keuangan. Sehingga, pihak *stakeholders eksternal* perusahaan dapat melihat informasi tentang perusahaan tempat mereka berinvestasi. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak *stakeholders eksternal* dalam pengambilan keputusan untuk tetap berinvestasi atau tidak kepada perusahaan yang bersangkutan ke depannya. Untuk itu, sangat menjadi tekanan bagi pihak manajemen perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan dengan memperbesar laba perusahaan.

2.2 Positive Accounting Theory (Teori Akuntansi Positif)

Teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Anisa (2012) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Faisal (2012) menyatakan bahwa teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini dikarenakan

akuntansi teori positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*), (2) antara manajemen dengan kreditor (*the debt to equity hypothesis*), dan (3) antara manajemen dengan pemerintah (*the political hypothesis*). Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yaitu Watts dan Zimmerman, (1986) :

a. *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan.

b. *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam penjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian.

c. *The Political Cost Hypothesis*

Scott (2000) dalam Faisal (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

2.3 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Tuntutan akan kepatuhan terhadap pembayaran pajak penghasilan telah ditetapkan KEP-07/PJ/2015. Peraturan PER 01/PJ/2015 tentang tata cara pembayaran pajak penghasilan (www.online-pajak.com). Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk membayar pajak setiap tahun pembukuan. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*). Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk membayar pajak sesuai dengan laba yang didapat.

2.4 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Secara umum, penghindaran pajak didefinisikan sebagai penurunan pajak yang jelas per masing-masing laba akuntansi sebelum pajak. Beberapa mendefinisikan penghindaran pajak sebagai mengambil tindakan hukum untuk mengurangi kewajiban pajak. Penghindaran pajak dilakukan dalam kerangka undang-undang perpajakan dan membayar tidak memiliki alasan untuk khawatir tentang kemungkinan investigasi tindakannya (Jamei, 2017)

Meminimalkan pajak dapat dilakukan dengan berbagai eksekusi. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan (1) perencanaan pajak substantif yang memindahkan subjek pajak dan objek pajak ke surga pajak atau pemerintah telah memberikan perlakuan pajak khusus; (2) Perencanaan pajak formal yang mempertahankan substansi ekonomi dari setiap transaksi dengan memilih transaksi formal yang dapat memberikan persyaratan pajak yang lebih rendah; (3) Peraturan anti penghindaran pajak terhadap transaksi penentuan harga transfer, kapitalisasi tipis, perjanjian belanja dan perusahaan asing yang dikendalikan (aturan anti penghindaran khusus dan aturan anti penghindaran umum (Waluyo, 2019)

2.5 Corporate Governance

Pasal Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah “suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berdasarkan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholder* yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Kehadiran CG yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan CG suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme CG yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan (Sandy & Lukviarman, 2015)

2.6 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Maraya & Yendrawati, 2016). Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Menurut Reza (2018) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai

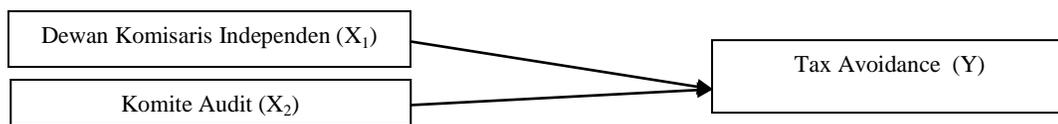
Muhammad Jalil, *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI*

komisaris independen. Dewan komisaris paling kurang berjumlah 2 orang anggota yang mana 1 diantaranya adalah komisaris independen, jika anggota dewan komisaris lebih dari 2 orang maka jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

2.7 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab untuk mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dan perusahaan. Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada dalam struktur tata kelola perusahaan di perusahaan publik (Widuri, Wijaya, Effendi, & Cikita, 2019). Menurut Daniri (2006) dalam Sandy & Lukviarman (2015) sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur CG perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.

Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1



2.8 Hipotesa

Berdasarkan kerangka teoritis hubungan antar variabel di atas, maka hipotesis penelitian yang di ajukan adalah sebagai berikut :

- H₁: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
- H₂ : Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
- H₃ : Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang *listing*/terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan perbankan yang *listing*/terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian dilakukan pada tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2016-2018.
- b. Perusahaan tidak pernah *delisting* selama masa tahun 2016-2018
- c. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap selama periode 2016-2018
- d. Perusahaan perbankan yang tidak mengalami rugi selama tahun 2016-2018

3.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan juga yaitu data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari studi yang dipublikasikan (biasanya berfokus pada hasil survei atau studi kasus yang menampilkan satu atau beberapa insiden), analisis dokumen, pengambilan informasi dari database organisasi (Cooper, 2014). Data tersebut adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dipublikasikan oleh *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* yang bersumber dari situ www.idx.co.id

3.3 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Corporate Governance*. Pengukuran *Corporate Governance* menggunakan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen, pengukuran dalam variabel ini di jelaskan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris Independen (X₁)

Menurut Reza (2018) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Keberadaan dewan komisaris diukur dengan menggunakan jumlah dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan.

b. Komite Audit (X₂)

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab untuk mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dan perusahaan (Widuri, Wijaya, Effendi, & Cikita, 2019). Komite audit dalam penelitian diukur dengan menggunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah langkah yang diambil seseorang untuk menghindari pajak tetapi dengan cara yang legal (Marselawati et al., 2018). Menurut Dyreng et. al. dalam Oktofian (2015) variabel ini dihitung melalui *CASH ETR* (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan. *CASH ETR* adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (*EBIT*) dengan rumus sebagai berikut :

$$CASH ETR = \frac{\text{Biaya Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100 \%$$

3.4 Teknik Analisa Data

Dalam rangka menguji hipotesis yang telah dirumuskan, model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS (*Statistical Product Service Solution*). Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, dengan maksud untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2013). Jadi analisis ini dilakukan karena jumlah variabel independen yang diteliti lebih dari satu variabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga jumlah sampel yaitu sebanyak 75 perusahaan. Berikut ini merupakan proses seleksi sampel penelitian yang digunakan berdasarkan kriteria :

Tabel 4.1
Proses Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2016-2018.	42
2	Perusahaan tidak pernah <i>delisting</i> selama masa tahun 2016-2018	40
3.	Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap selama periode 2016-2018	37
	Perusahaan perbankan yang tidak mengalami rugi selama tahun 2016-2018	25
Jumlah sampel penelitian		25
Tahun Pengamatan		3
Jumlah pengamatan yang dijadikan sampel selama periode penelitian		75

Sumber : data olahan 2019

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif

Didasarkan pada ruang lingkup bahasanya statistik deskriptif mencakup ukuran nilai pusat (rata-rata, median, modus, kuartil dan sebagainya); ukuran dispersi (jangkauan, simpangan, rata-rata, variasi, simpangan baku, dan sebagainya) dan ukuran lainnya (Ghozali, 2011). Berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 4.2
Hasil uji statistik deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen	75	1.00	5.00	2.8667	.79412
Komite Audit	75	3.00	7.00	3.8800	1.06492
Tax Avoidance	75	11.48	36.46	25.0461	4.17681
Valid N (listwise)	75				

Sumber : data olahan SPSS. versi 17, 2019

Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil bahwa variabel penelitian memiliki jumlah data yang menjadi sampel penelitian sebanyak 75 perusahaan dengan nilai minimum pada komisaris independen yaitu 1 dan nilai maksimum 5. Jumlah minimal komite audit yang dimiliki perusahaan adalah sebanyak 3 orang dan maksimal sebanyak 7

orang. Kemudian *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan memiliki nilai minimum 11.48% dan maksimal 36.46%.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini, untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Salah satu cara termudah untuk mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal P-P Plot. Penerapan pada uji ini juga dijelaskan dalam Ghazali (2011) adalah jika signifikansi < 0.05 maka data yang diuji tidak normal dan jika signifikansi > 0.05 maka data yang diuji mempunyai distribusi yang normal.

Tabel 4.3
Hasil uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.96222735
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.074
	Negative	-.137
Kolmogorov-Smirnov Z		1.186
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120

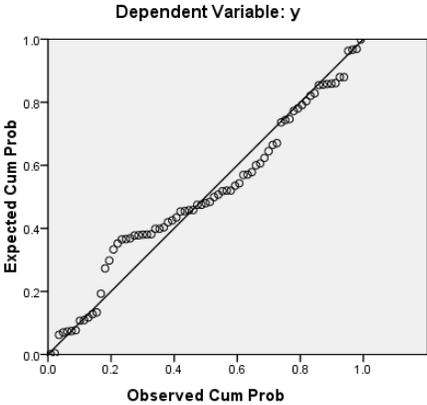
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data olahan SPSS. versi 17, 2019

Pada tabel 4.3 menunjukan nilai *kolmogrov smirnov* sebesar 1.186 serta nilai *koefisien asymp. signifikan (2 tailed)* sebesar 0.120. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1
Hasil uji normalitas
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : data olahan SPSS. versi 17, 2019

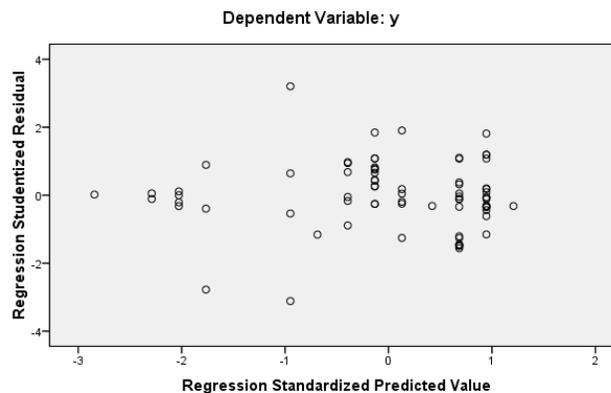
Pada gambar 4.1 dapat dilihat hasil bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang ditentukan memiliki distribusi yang normal atau memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2.2 Hasil Uji Heteroskedasitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Pemeriksaan terhadap gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola diagram pencar (*scatter plot*). Jika diagram pencar yang ada membentuk pola-pola tertentu yang teratur maka regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Gambar 4.2
Hasil uji heteroskedasitas
Scatterplot



Sumber : data olahan SPSS. versi 17, 2019

Pada gambar 4.2 menunjukkan hasil grafik *scatterplot* yaitu tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari asumsi heteroskedasitas dan layak untuk dipakai.

4.2.2.3 Hasil Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam modal regresi terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Uji ini dilakukan karena penelitian menggunakan data *time series*. Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi yang dapat dilakukan pengujiannya melalui uji *Durbin-Watson* (Uji DW) dengan ketentuan yaitu jika angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif, jika angka DW diantara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi dan jika angka DW diatas +2 maka ada autokorelasi negatif.

Tabel 4.4
Hasil uji autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.316 ^a	.100	.075	4.01688	.896

a. Predictors: (Constant), komisaris independen dan komite audit

b. Dependent Variable: *tax avoidance*

Sumber : data olahan SPSS. versi 17, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 maka diapat dilihat bahwa nilai *durbin watson* yaitu sebesar 0.896 dimana nilai tersebut berada diantar nilai -2 hingga +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.2.2.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama atau nol, untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan menganalisis korelasi variabel-variabel bebasnya atau dapat juga dengan melihat nilai *tolerance* serta nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10 (Ghozali, 2011).

Tabel 4.5
Hasil uji multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	30.224	1.975		15.302	.000		
Komisaris Independen	-.346	.707	-.066	-.489	.626	.691	1.448
Komite Audit	-1.079	.528	-.275	-2.045	.045	.691	1.448

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : data olahan SPSS. versi 17, 2019

Pada tabel 4.5 menunjukkan hasil yaitu variabel independen memiliki nilai VIF sebesar 1.448 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10. Kemudian variabel independen memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.691 dimana nilai ini lebih besar dari 0.1. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat korelasi antar variabel independen atau variabel independen tidak mengandung multikolinearitas.

4.2.3 Hasil Uji Hipotesa

4.2.3.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian hepotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X₁, X₂) dengan variabel dependen (Y). Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yakni :

Tabel 4.6
Hasil uji regresi linear berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	30.224	1.975		15.302	.000
Komisaris Independen	-.346	.707	-.066	-.489	.626
Komite Audit	-1.079	.528	-.275	-2.045	.045

a. Dependent Variable: tax avoidance

Sumber : data olahan SPSS. versi 17, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 30.224 - 0.346X_1 - 1.079X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Tax avoidance
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- X₁ : Komisaris Independen
- X₂ : Komite Audit
- ε : Error

4.2.3.2 Hasil uji Parsial

Uji ini dimaksud untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan dengan variabel lain dianggap konstan serta dengan tingkat keyakinan 95% (α = 0.05). Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t hitung dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:

Muhammad Jalil, Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI

- a. Jika signifikansi t hitung < 0.05 maka Ha diterima
- b. Jika signifikansi t hitung > 0.05 maka Ha ditolak

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukan hasil bahwa variabel komisaris independen memiliki nilai signifikan sebesar 0.626 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 (0.626 > 0.05) sehingga dapat disimpulkan yaitu H₁ ditolak atau komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel komite audit memiliki nilai signifikan sebesar 0.045 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 (0.045 < 0.050) sehingga dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima atau komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.2.3.3 Hasil Uji Simultan

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan koefesien seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan dalam pengujian ini adalah 5%. Adapun pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah jika signifikansi (α) < 0,05 maka Ha diterima dan jika signifikansi (α) > 0,05 maka Ha ditolak.

Tabel 4.7
Hasil uji simultan
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	129.242	2	64.621	4.005	.022 ^a
Residual	1161.744	72	16.135		
Total	1290.986	74			

a. Predictors: (Constant), komisaris indepenen, komite audit

b. Dependent Variable: Tax avoidance

Sumber : data olahan SPSS. versi 17, 2019

Pada tabel 4.7 menunjukan hasil bahwa nilai signifikan sebesar 0.022 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 (0.022 < 0.050). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima yaitu komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.2.3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefesien determinan (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai Koefesien determinanasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Tabel 4.8
Hasil uji koefisien determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.316 ^a	.100	.075	4.01688	.896

a. Predictors: (Constant), komisaris indepenen, komite audit

b. Dependent Variable: Tax avoidance

Sumber : data olahan SPSS. versi 17, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 maka diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0.075. Nilai *adjusted R Square* ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas dalam hal ini adalah variabel komisaris independen dan komite audit yaitu sebesar 0.075 atau 7.5% terhadap *tax avoidance*. Sedangkan sisanya yaitu 92.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Komisaris Indpendenden tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukan bahwa variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi 0.626 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 (0.626 > 0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, besar kecilnya proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak mampu dalam mengendalikan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini sejalan dengan Widuri, Wijaya, Effendi, & Cikita (2019) dan Maraya & Yendrawati (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut dan Maraya & Yendrawati (2016) hasil yang tidak berpengaruh tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris lemah di dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dalam hal perpajakan yang akan menguntungkan perusahaan.

4.3.2 Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki nilai signifikansi 0.045 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 ($0.045 < 0.050$) sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien variabel komite audit sebesar -0.346 hal ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif Artinya, semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka mampu dalam mengendalikan atau menunahkan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Komite audit adalah salah satu organ perusahaan yang membantu dewan komisaris dalam hal pengawasan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Komite audit juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan audit internal dan eksternal (Puspita & Harto, 2014).

Penelitian ini sejalan dengan Widuri, Wijaya, Effendi, & Cikita (2019) dan Apriliyana & Suryarini (2018) dimana apabila jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan kecil, perusahaan akan meningkatkan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki sejumlah besar anggota komite, pengawasan yang dilakukan pada manajemen semakin ketat dan mengurangi penghindaran pajak.

4.3.3 Komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel komisaris independen dan komite audit memiliki nilai signifikansi 0.022 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 ($0.022 < 0.050$). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, besar atau kecilnya jumlah komisaris independen dan komite audit dalam perusahaan secara bersama-sama akan mampu mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Komisaris independen dapat memiliki efek negatif karena jika komisaris independen mengalami peningkatan, kegiatan penghindaran pajak akan menurun sehingga peningkatan proporsi komisaris independen dapat mencegah kegiatan penghindaran pajak. Kemudian peran komite audit dengan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan sebagai pengawas dapat mempersempit peluang bagi manajemen untuk meminimalkan beban pajak. Penelitian ini sejalan dengan Sandy & Lukviarman (2015) bahwa *corporate governance* yang diprosikan juga dalam komisaris independen dan komite audit akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance* dalam suatu perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linera berganda yang dilakukan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
- Komite audit secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
- Komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
- Koefisien determinasi adalah 0.075 yang memperlihatkan besarnya pengaruh variabel bebas yang digunakan di dalam model penelitian terhadap *tax avoidance* selaku variabel terikat adalah 7.5%.

5.2 Saran

- Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah periode penelitian, karena semakin panjang jangka waktu penelitian akan diketahui variasi yang terjadi pada suatu perusahaan dan tentunya akan memberikan kontribusi hasil penelitian yang lebih tepat dan akurat dimasa yang akan datang.
- Baik dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan serta menambah variabel atau proksi lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yang tidak dijelaskan pada penelitian ini, seperti, karakter eksekutif, resiko perusahaan, ukuran perusahaan, *multinational company*, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan,

Muhammad Jalil, *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI*

kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan saham publik dan kepemilikan saham terbesar, *leverage*, kompensasi rugi fiskal, *retrun on assets*, konservatisme akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa dan Kurniasih. 2012. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8. No. 2
- Apriliyana, N., & Suryarini, T. 2018. *The Effect Of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation*. Accounting Analysis Journal, 7(3), 159–167.
- Cooper, D.R. dan P.S. Schindler. 2014. *Business Research Methods (12th ed.)*. Boston: McGraw Hill
- Faisal Reza. 2012. *Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak*. Fakultas Ekonomi, Program S1 Ekstensi Akuntansi Depok
- Fisher, J. F. (2014). *Fairer Shores: Tax Havens, Tax Avoidance, And Corporate Social Responsibility*. BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW, 94(337), 337–365.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jamei, R. 2017. *Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange*. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4), 638–644.
- Khoirunisa. 2013. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. 2016. *Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 20(2), 147–159.
- Marselawati, D., Titisari, K. H., & Masitoh, E. 2018. *The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance (Empirical Study of the Consumer Goods Industry Companies Listed On Indonesia Stock Exchange Period 2013-2016)*. The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018, 2(1), 123–132.
- Maryam,Siti. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyajian Lpaoran Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI*. UIN-SUSKA RIAU
- Oktofian, Muhammad. 2015. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Skripsi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Pohan,Anwar. 2011. *Kajian Perpajakan dan Tax Planning Terkini*. Edisi I. Bumi Aksara: Jakarta
- Puspita, Silvia Ratih dan Puji Harto. 2014. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. Diponegoro Journal of Accounting Volume 3 No. 2.
- Putri, C. R., & Putri, M. A. 2017. *Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variable Intervening*. Jurnal Ekonomi Manajemen, 2(2), 21–31.
- Reza, Z. 2018. *Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance*. JOM FEB, 1(1), 1–15.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. 2015. *Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 19(2), 85–98. 1
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung
- Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN
- Waluyo, W. 2019. *The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of the Indonesian Banking Company*. The Accounting Journal of Binaniaga, 2(02), 1–10.
- Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall: USA
- Widuri, R., Wijaya, W., Effendi, J., & Cikita, E. 2019. *The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017*. Journal of Economics and Business, 2(1).
- Wijayanti, A., Masitoh, E., & Mulyani, S. 2018. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1), 322–340.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/pelita-cengkareng-gugat-balik-molucca-dan-bank-permata-soal-penghindaran-pajak>
www.online-pajak.com
www.idx.co.id

Muhammad Jalil, *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI*